

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Hutang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Buku

- Elyta Ras Ginting, 2018, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta
Ibrahim, Johnny, 2007, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-3*", Malang: Bayumedia Publishing, Malang
Man S. Sastrawidjaja, 2010, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, Alumni, Bandung
Hardijan Rusli, Hukum ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hal 89
Rachmadi Usman. 2004. "Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia." Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama. Hal.11
Siti Soemartii Hartono, 1981, "Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran" Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
Soejono dan Abdurrahman, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta,
Jakarta
Soekanto, Soerjono, 2015, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia
UI Press, Jakarta
Zaeny Asyhadie. 2005. Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia.
Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 225

Skripsi

- Ginting, B. 2008, "Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan
Investasi di Indonesia." Universitas Sumatera Utara, Medan.

Grace Vina, 2016, “Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Nurul Farah Sahlisah, 2021, “Tinjauan Yuridis Tentang Upah Kerja Lembur Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan”. Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB

Salshabila, Annisa, 2019, “Peninjauan Ulang Terhadap Konteks Penerapan Insolvency Test Dalam Perkara Kepailitan di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal

Alif Kurnia Putra, Juli 2019, “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven” , Volume 2, Nomor 4 <https://www.ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/14484/8010>

Andiny Rahimah Kaffah, Atik Winanti, 2021, “Pemberian Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), Universitas Semarang, Volume 11 No. 2.

Budiman Ginting, 2008, “Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia”, makalah yang disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Universitas Sumatera Utara, medan, 20 September.

Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila, dan Shrishti, Tahun 2021, “urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia”.

Dewi Rusmy Mustari, Teddy Anggoro, Myra R. Budi Setiawan, 2013, Tinjauan Yuridis Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok

Diana Surjanto, Oktober 2018, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Volume 3, Nomor 2.

- Indra Fachrurahman, Happy Yulia Anggraeni , Fitri Wahyuni, April 2021, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Upah Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013”, Volume 4, Nomor 1
- Lili Naili Hidayah. Maret 2016, ”Indikator Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia”.Jurnal Hukum Vol.7.No.1
- Luthvi Febryka Nola, september 2020, “Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit Di Masa Pandemi COVID-19”. Volume 7, Nomor 18.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-18-II-P3DI-September-2020-209
- M. Hadi Shubhan, September 2019, “Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayarkan Pengusaha”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Susilo Andi Darma, 2013, “ Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan”, Universitas Islam Negeri, Vol,2 No 1.
- Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga”, Universitas Gajah Mada Yogja, Volume 14, Nomor 2.

Sumber lainnya

- <http://www.hukumonline.com>, “Nasib karyawan istaka dipastikan aman”, Diakses tanggal 19 May 2022.
- Kemenko Perekonomian, Penjelasan RUU Cipta Kerja (Dalam bentuk presentasi), Forum Group Discussion,FPG DPR RI, 26 Februari 2020
- Hadi Subhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2019).
- Muhammad irham roihan, s.h. (2021): Omnibus law ditinjau dari perspektif sistem perundang- undangan di indonesia, tesis program magister Universitas Islam Indonesia, Malang
- Ketentuan seputar perjanjian kerja
<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-kerja>